

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh periode 2017–2019 merupakan dampak dari diskriminasi sistematis dan operasi militer Myanmar yang memicu eksodus massal sejak Agustus 2017. Arus pengungsi tersebut menimbulkan tantangan kemanusiaan yang kompleks bagi Bangladesh sebagai negara penerima pengungsi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan hak-hak pengungsi, serta menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Meskipun bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Bangladesh tetap menerapkan kebijakan Open Door Policy sebagai bentuk komitmen kemanusiaan, disertai berbagai kebijakan untuk menyeimbangkan perlindungan pengungsi dengan kepentingan nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa UNHCR memiliki peran yang sangat penting dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh. Ditinjau melalui konsep peran organisasi internasional Clive Archer, UNHCR menjalankan perannya sebagai arena dengan baik. Organisasi tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah Bangladesh, lembaga PBB, NGO, dan negara-negara pendonor dalam merancang serta melaksanakan respons kemanusiaan, dibuktikan melalui terciptanya program Joint Response Plan (JRP) dan Refugee Coordination Platform (RCP). Sebagai instrumen, UNHCR digunakan oleh pemerintah Bangladesh dan komunitas internasional untuk menangani dampak krisis pengungsi Rohingya, UNHCR mengimplementasikan berbagai program perlindungan dan bantuan, seperti registrasi pengungsi, penyediaan tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, dan distribusi bantuan kemanusiaan. Sementara itu, sebagai aktor independen, peran UNHCR terbatas pada fungsinya sebagai organisasi kemanusiaan yang melindungi dan memberikan bantuan bagi pengungsi, UNHCR tidak memiliki kewenangan untuk mengatur negara dalam merespons krisis Rohingya, peran UNHCR dalam memengaruhi negara hanya

terbatas pada pengadvokasian hak-hak pengungsi sesuai yang diamanatkan dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh periode 2017–2019 tidak terlepas dari peran strategis UNHCR sebagai organisasi internasional. Ketiga peran tersebut saling melengkapi sehingga memungkinkan terciptanya koordinasi internasional yang lebih efektif, penyaluran bantuan kemanusiaan yang lebih terarah, serta perlindungan yang lebih optimal bagi pengungsi Rohingya. Meskipun demikian, efektivitas peran UNHCR tetap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Bangladesh, situasi politik Myanmar, serta dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional.

6.2 SARAN

6.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan konsep peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer yang penulis gunakan sebagai tumpuan dalam menganalisis penelitian ini. Terdapat sedikit perbedaan antara definisi konsep peran organisasi internasional sebagai aktor dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Menurut Clive Archer organisasi bisa bertindak secara otonom tanpa terikat dengan aktor lain terutama negara, sehingga dapat diartikan bahwa organisasi internasional mampu membuat keputusan sendiri dan menjalankan fungsinya tanpa harus bergantung secara penuh pada tekanan atau pengaruh dari negara anggotanya.

Realita di lapangan UNHCR sebagai sebuah organisasi internasional masih sangat bergantung pada negara terutama dalam aspek pendanaan, sebagian besar bantuan kemanusiaan dan program yang dilaksanakan oleh UNHCR untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh masih sangat bergantung pada bantuan internasional dari negara pendonor. Lebih lanjut, UNHCR juga tidak mampu untuk mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh negara terutama oleh Bangladesh dan Myanmar yang menjadi aktor penting dalam krisis Rohingya. Dalam konteks Bangladesh, pemerintah Bangladesh secara resmi telah menutup akses

perbatasannya bagi pengungsi Rohingya sejak tahun 2019, kebijakan tersebut sangat berdampak bagi ribuan pengungsi Rohingya yang ingin menyelamatkan diri ke Bangladesh. Dalam kasus ini, UNHCR tidak mampu untuk mengintervensi apalagi mengubah kebijakan Bangladesh tersebut.

Dalam konteks Myanmar, pemerintah Myanmar sampai saat ini belum mau untuk berkomitmen dalam melindungi dan menjamin hak-hak kelompok Rohingya, kebijakan yang diskriminatif masih diterapkan dan upaya-upaya yang melanggar hak asasi manusia masih terus dipertontonkan oleh pemerintah Myanmar. Dalam kasus ini, UNHCR juga tidak mampu untuk mengintervensi kebijakan pemerintah Myanmar.

Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu ini, bisa menggunakan teori neoliberal institusionalisme untuk memperkaya analisis penelitian, karena asumsi utama teori tersebut lebih menekankan pada kerja sama internasional untuk mencapai tujuan bersama dan mengurangi potensi konflik di tengah sistem internasional yang anarkis. Harapannya apabila peneliti selanjutnya menggunakan teori tersebut, dapat memperkaya analisis, penjelasan, dan pengetahuan yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

6.2.2 Saran Praktis

Saya sebagai penulis penelitian ini ingin memberikan saran praktis yang ditujukan kepada tiga pihak utama dalam penelitian ini, yaitu UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk melindungi pengungsi, Bangladesh sebagai negara utama penerima pengungsi Rohingya, dan Myanmar sebagai akar masalah terjadinya krisis Rohingya.

1. UNHCR: UNHCR perlu untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Bangladesh, organisasi internasional, negara pendonor, dan NGO untuk memastikan efektivitas penanganan pengungsi Rohingya. Mengingat krisis Rohingya merupakan isu yang kompleks dan berkepanjangan, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi agar bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada seluruh pengungsi. UNHCR juga perlu untuk meningkatkan

program-program pemberdayaan pengungsi dan rehabilitasi mental, program dalam bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas masyarakat pengungsi harus dijalankan secara maksimal demi masa depan pengungsi Rohingya. Upaya tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan pengungsi terhadap bantuan kemanusiaan serta mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri, baik selama berada di kamp pengungsian maupun ketika proses repatriasi dapat dilaksanakan di masa mendatang. Terakhir, UNHCR perlu untuk terus melakukan advokasi kepada komunitas internasional agar perhatian terhadap krisis Rohingya tetap terjaga dan tidak redup. Menurunnya komitmen pendanaan internasional berpotensi menghambat berbagai program kemanusiaan yang dijalankan di kamp pengungsian. Oleh karena itu, UNHCR harus memperkuat diplomasi kemanusiaan dan mobilisasi sumber daya internasional guna menjamin keberlanjutan perlindungan bagi para pengungsi Rohingya.

2. Pemerintah Bangladesh: Pemerintah Bangladesh diharapkan tetap mempertahankan komitmen kemanusiaannya dalam memberikan perlindungan sementara kepada pengungsi Rohingya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan stabilitas domestiknya. Meskipun Bangladesh menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, pendekatan kemanusiaan yang telah diterapkan selama ini perlu terus dipertahankan sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelesaian isu kemanusiaan global. Pemerintah Bangladesh harus lebih memperhatikan kualitas pengelolaan kamp pengungsian melalui penyediaan layanan dasar yang lebih memadai, seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan UNHCR dan organisasi internasional lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas penanganan pengungsi serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal di sekitar kamp pengungsian. Pemerintah Bangladesh harus mengupayakan diplomasi internasional untuk mendorong penyelesaian akar permasalahan krisis Rohingya. Pemerintah dapat memanfaatkan berbagai forum regional dan global untuk memperoleh

dukungan politik untuk menekan pemerintah Myanmar agar mau untuk menerima proses repatriasi pengungsi.

3. Pemerintah Myanmar: Pemerintah Myanmar perlu menunjukkan komitmen yang lebih serius dalam menyelesaikan akar masalah krisis Rohingya. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap etnis Rohingya dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Tanpa adanya perubahan kebijakan yang mendasar, upaya penyelesaian krisis hanya akan bersifat sementara dan berpotensi memunculkan gelombang pengungsian baru di masa depan. Pemerintah Myanmar juga perlu menciptakan kondisi yang kondusif untuk proses repatriasi pengungsi Rohingya dengan menjamin keamanan, perlindungan hukum, akses terhadap layanan publik, serta hak kewarganegaraan yang jelas. Jaminan tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan para pengungsi sehingga mereka bersedia kembali ke negara asalnya secara sukarela tanpa rasa takut akan terjadinya kembali tindakan kekerasan dan diskriminasi. Terakhir, pemerintah Myanmar harus terbuka bagi berbagai organisasi internasional dan NGO yang ingin membantu dalam penyelesaian isu ini.